

LAPORAN THESIS

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM SISTEM
PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DI INSTALASI GAWAT
DARURAT RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA
DI PANGKALPINANG**



**Desika Santi
NIM 22.C2.0049**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

LAPORAN THESIS

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM SISTEM
PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DI INSTALASI GAWAT
DARURAT RUMAH SAKIT PRIMAYA BHAKTI WARA
DI PANGKALPINANG**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan**



**Desika Santi
NIM 22.C2.0049**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh negara dalam mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional, bertujuan menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif serta memiliki sifat pencegahan dalam peraturan yang telah ada dan sifat hukuman bagi yang melanggar. RS yang bekerja sama dengan BPJS sering tidak menerima pasien tidak sesuai dengan kriteria kegawatdaruratan. Untuk itu, maka tesis ini akan menjabarkan lebih lanjut mengenai **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Pelayanan Kegawatdaruratan Di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara Di Pangkalpinang.”**

Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data dari *focus group discussion* yang diikuti oleh Dokter Umum, manajemen, dan Dokter Spesialis serta keluarga pasien. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitiannya peraturan Rumah sakit diambil dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 17 Tahun 2023 tentang hukum kesehatan yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dan tenaga medis secara tegas, termasuk sanksi administratif atau pidana serta adanya Perpres No. 12 Tahun 2013 yang memastikan pasien darurat JKN tetap dilayani meskipun diagnosisnya di luar daftar yang dijamin, dengan hak mengajukan keberatan.

Kesimpulannya terdapat pengaturan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban para subyek hukum dalam hal ini peserta kegawatdaruratan BPJS didasari oleh dasar hukum yaitu UUD 1945 pada pasal 28 H yang memuat setiap orang berhak memperoleh Kesehatan. Hal ini sejalan dengan pembahasan kegawatdaruratan dalam UU Kesehatan, UU SJSN dan UU Kegawatdaruratan. Pada pelaksanaan perlindungan hukum dari peserta JKN diatur dalam UU SJSN, Rumah Sakit menggunakan peraturan direktur sebagai landasan pelayanan, namun terdapat hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak pasien terkait dengan sistem rujukan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan aturan BPJS kesehatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan JKN yang menjadi kendala dalam mengakses pelayanan IGD. Oleh karena itu diperlukan legalisasi dan penyempurnaan regulasi tersebut agar produk hukumnya efektif serta perlu adanya sosialisasi oleh BPJS kesehatan untuk masyarakat agar dapat memahami dan menaati peraturan sebagai peserta JKN.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Instalasi Gawat Darurat, Jaminan Kesehatan Nasional

ABSTRACT

One of the initiatives undertaken by the state in developing the National Social Security System, aims to guarantee legal protection and social welfare for all Indonesian people. In legal protection, there is preventive legal protection and repressive legal protection and has a preventive nature in existing regulations and the nature of punishment for those who violate them. Hospitals that cooperate with BPJS often do not accept patients who do not meet emergency criteria. For this reason, this thesis will further explain the “ **Implementation of Legal Protection for the Rights of Patients Participating in National Health Insurance (JKN) in the Emergency Service System in the Emergency Room (IGD) of Primaya Bhakti Wara Hospital in Pangkalpinang.**”

The research approach method uses sociological juridical with analytical descriptive research specifications, data from focus group discussions attended by General Practitioners, management, and Specialist Doctors and patient families. The data analysis technique used in this study is qualitative analysis. The results of the study, hospital regulations are taken from Law No. 40 of 2004 concerning SJSN, Law No. 17 of 2023 concerning health law which regulates the responsibilities of hospitals and medical personnel firmly, including administrative or criminal sanctions and the existence of Presidential Regulation No. 12 of 2013 which ensures that JKN emergency patients are still served even though their diagnosis is outside the guaranteed list, with the right to file an objection.

In conclusion, there are legal protection regulations related to the rights and obligations of legal subjects in this case BPJS emergency participants based on the legal basis, namely the 1945 Constitution in Article 28 H which states that everyone has the right to obtain health. This is in line with the discussion of emergencies in the Health Law, the SJSN Law and the Emergency Law. In the implementation of legal protection for JKN participants regulated in the SJSN Law, the Hospital uses the director's regulations as the basis for service, but there are obstacles encountered in fulfilling patient rights related to the referral system and the lack of public knowledge related to BPJS health regulations. This is due to the lack of understanding of JKN provisions which are obstacles in accessing IGD services. Therefore, legalization and improvement of these regulations are needed so that the legal product is effective and there needs to be socialization by BPJS health for the public so that they can understand and obey the regulations as JKN participants.

Keywords: Legal Protection, Emergency Installation, National Health Insurance